



**BUKU III**  
**PETA**  
**RENCANA**  
**SPBE**  
**2023 - 2027**

Pemerintah Kota Tasikmalaya

# Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b>	<b>2</b>
<b>Bab I</b>	<b>4</b>
<b>Portofolio</b>	<b>4</b>
<b>Inisiatif SPBE</b>	<b>4</b>
1.1. Tata Kelola	5
1.1.1. Kebijakan Tim koordinasi SPBE	5
1.1.2. Kebijakan Forum Satu Data	5
1.1.3. Kebijakan Arsitektur SPBE	6
1.1.4. Kebijakan Peta Rencana SPBE	6
1.1.5. Kebijakan Manajemen Data	7
1.1.6. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	7
1.1.7. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah	8
1.1.8. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	8
1.1.9. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	9
1.1.10. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	9
1.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE	10
1.1.12. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE	10
1.2. Manajemen SPBE	11
1.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko	11
1.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data	12
1.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan	13
1.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK	13
1.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK	14
1.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan	14
1.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan	15
1.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	15
1.3. Layanan SPBE	16
1.3.1. Survey Pengguna SPBE	16
1.3.2. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Terintegrasi	16
1.3.3. Pengembangan Portal Layanan Internal	17
1.4. Aplikasi SPBE	19
1.4.1. Pengembangan Aplikasi	19
1.4.2. Integrasi Aplikasi	21
1.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)	21
1.4.4. Pemeliharaan Aplikasi	22
1.5. Infrastruktur SPBE	23
1.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Pusat Data	23
1.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Pusat Data	24
1.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana	24
1.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	25
1.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	26
1.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT	27

1.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi	27
1.5.8. Pengembangan API Gateway	29
1.6. Keamanan Informasi	30
1.6.1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	30
1.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	31
1.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	32
1.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	34
1.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	35
1.6.6. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi	36
1.7. Audit SPBE	37
1.7.1. Pelaksanaan Audit SPBE	37
1.8. SDM SPBE	37
1.8.1. Penambahan SDM TIK	37
1.8.2. Penyelenggaraan Training SDM TIK	38
<b>Bab II</b>	
<b>Roadmap &amp; Estimasi Anggaran</b>	<b>40</b>
2.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kota Tasikmalaya 2023-2027	41
<b>LAMPIRAN</b>	<b>47</b>

# **Bab I**

# **Portofolio**

# **Inisiatif SPBE**

## 1.1. Tata Kelola

### 1.1.1. Kebijakan Tim koordinasi SPBE

**Tabel 1.1.1.1.** Program Kerja Kebijakan Tim koordinasi SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE untuk mengatur implementasi Tim Koordinasi SPBE.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.</li><li>2. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE.</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Tim Koordinasi SPBE.</li><li>2. Kebijakan Tim Koordinasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li><li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Tim Koordinasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li></ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO, Bag. Organisasi dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 1.

### 1.1.2. Kebijakan Forum Satu Data

**Tabel 1.1.2.1.** Program Kerja Kebijakan Forum Satu Data

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data, untuk mengatur implementasi Forum Satu Data.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data.</li><li>2. Pelaksanaan Kebijakan Forum Satu Data.</li><li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Forum Satu Data.</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Forum Satu Data.</li><li>2. Kebijakan Forum Satu Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li><li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Forum Satu Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li></ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO, BAPPEDA dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Forum Satu Data disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 2.

### 1.1.3. Kebijakan Arsitektur SPBE

**Tabel 1.1.3.1.** Program Kerja Kebijakan Arsitektur SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE untuk mengatur implementasi Arsitektur SPBE.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE.</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Arsitektur SPBE.</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Arsitektur SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Arsitektur SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Arsitektur SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 3.

### 1.1.4. Kebijakan Peta Rencana SPBE

**Tabel 1.1.4.1.** Program Kerja Kebijakan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE untuk mengatur implementasi Peta Rencana SPBE.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Peta Rencana SPBE</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Peta Rencana SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Peta Rencana SPBE di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Peta Rencana SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 4.

### 1.1.5. Kebijakan Manajemen Data

**Tabel 11.5.1.** Program Kerja Kebijakan Manajemen Data

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Manajemen Data untuk mengatur implementasi Manajemen Data.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Data</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Data</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Manajemen Data.</li> <li>2. Kebijakan Manajemen Data dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Manajemen Data Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO, BAPPEDA dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Manajemen Data SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 5.

### 1.1.6. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

**Tabel 11.6.1.** Program Kerja Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE untuk mengatur implementasi Pembangunan Aplikasi SPBE.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE.</li> <li>2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dievaluasi secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE disusun dengan menyesuaikan mandatori yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 6.

### 1.1.7. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah

**Tabel 1.1.7.1.** Program Kerja Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah untuk mengatur implementasi Layanan Jaringan Intra Pemerintah.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah.</li> <li>2. Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 7.

### 1.1.8. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

**Tabel 1.1.8.1.** Program Kerja Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	:	Penyusunan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengatur implementasi Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
Detail	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.</li> <li>2. Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat</li> </ol>
Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	:	2023-2027

Keterangan	: Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 8.
------------	--

### 1.1.9. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

**Tabel 1.1.9.1.** Program Kerja Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	: Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi untuk mengatur implementasi Manajemen Keamanan Informasi .
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi.</li> <li>2. Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 9.

### 1.1.10. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

**Tabel 1.1.10.1.** Program Kerja Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deskripsi	: Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengatur implementasi Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>2. Pelaksanaan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>3. Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Kebijakan implementasi SPBE yang mencakup indikator kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> <li>2. Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi di-<i>evaluasi</i> secara berkala minimal 1 tahun sekali.</li> <li>3. Melakukan pembaharuan kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Ketika ada perubahan aturan dari internal maupun pusat.</li> </ol>
Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Hukum

Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi disusun dengan menyesuaikan mandatory yang ada dalam nomenklatur evaluasi SPBE untuk indikator 10.

### 1.1.11. Pembentukan Komite/Forum SPBE

**Tabel 1.1.11.1.** Program Kerja Pembentukan Komite/Forum SPBE

Deskripsi	: Membentuk Komite/Forum manajemen SPBE, sejauh ini sesuai arahan dari Kemenpan-RB perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE, Komite/Forum Manajemen Data, Komite/Forum Manajemen Risiko dari ketiga hal tersebut yang belum dibentuk yakni Komite/Forum Manajemen Risiko
Detail	: Membentuk Komite/Forum Manajemen Risiko yang mengacu pada pedoman nasional tentang manajemen SPBE
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Koordinasi SPBE</li> <li>2. Komite Forum Satu Data</li> <li>3. Komite Manajemen Risiko</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	: Sudah dilakukan
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

### 1.1.12. Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE

**Tabel 1.1.12.1.** Program Kerja Monev Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Deskripsi	: Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE secara berkala mengikuti pedoman SPBE dari Instansi Pusat terkait.
Detail	: Adapun evaluasi dan revisi tata Kelola SPBE dilakukan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi Indeks SPBE Evaluasi ini dilakukan setiap tahun dengan menganalisis Indeks Eksisting dan memastikan implementasi SPBE pelaksanaannya telah sesuai dengan Peta Rencana SPBE.</li> <li>● Evaluasi dan Revisi Kebijakan SPBE Dikarenakan pedoman SPBE dari Instansi Pusat masih bersifat dinamis dapat berubah sewaktu-waktu, maka Kebijakan SPBE Kota Tasikmalaya perlu dilakukan evaluasi dan revisi sesuai dengan arahan kebijakan terbaru dari Instansi Pusat.</li> <li>● Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE</li> </ul>

	<p>Arsitektur dan Peta Rencana merupakan <i>living document</i> sehingga perlu dilakukan pembaharuan setiap tahunnya untuk mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE sesuai Perubahan setiap tahunnya.</li> <li>• Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE Perlu adanya Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE agar setiap tahunnya Layanan SPBE semakin efektif dan efisien.</li> </ul>
Indikator Pencapaian	: Tersedianya Dokumen Arsitektur SPBE
Unit Kerja Pelaksana	: Tim Koordinasi SPBE
Pelaksanaan	: 2023 - 2027
Keterangan	: Secara rutin perlu mengikuti bimtek dan sosialisasi dari Kemenpan-RB guna memastikan Tata Kelola SPBE selalu mengikuti perkembangan arahan dari Instansi Pusat terkait.

## 1.2. Manajemen SPBE

### 1.2.1. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

**Tabel 1.2.1.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko

Deskripsi	: Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko SPBE merupakan sebuah langkah strategis dalam rangka membangun pondasi kebijakan Manajemen SPBE yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko SPBE pada instansi pemerintah, Pedoman yang dapat mengacu pada Permenpan-RB 05/2020.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE.</li> <li>2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko yang termuat dalam Renstra/RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika.</li> <li>3. Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD.</li> <li>4. Penetapan konteks risiko SPBE.</li> <li>5. Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak.</li> <li>6. Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE 6 Penyusunan evaluasi Risiko SPBE.</li> <li>7. Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya.</li> <li>8. Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental.</li> </ol>

	9. Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE. 10. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE oleh DISKOMINFO.
Indikator Pencapaian	: 1. SK Komite Manajemen Risiko SPBE. 2. Penerapan Manajemen Risiko SPBE. 3. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko SPBE
Unit Kerja Pelaksana	: INSPEKTORAT, DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: Dalam penyusunan Manajemen Risiko SPBE Mengikuti arahan kebijakan terkait Manajemen SPBE yang berlaku.

## 1.2.2. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

**Tabel 1.2.2.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Data

Deskripsi	: Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
Spesifikasi	: 1. Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data Pemerintah Daerah. 2. Penyusunan Arsitektur Data. 3. Pengumpulan data sektoral dimasing-masing unit kerja. 4. Pemeriksaan pemenuhan data sektoral. 5. Penyebarluasan data sektoral. 6. Pembaruan Data Sektoral secara berkala. 7. Penyimpanan data pada Portal Open Data. 8. Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data.
Indikator Pencapaian	: Penerapan Manajemen Data
Unit Kerja Pelaksana	: BAPPEDA
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: Dalam penyusunan manajemen Data Mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

### 1.2.3. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan

**Tabel 1.2.3.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Layanan

Deskripsi	:	Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan SK Tim Helpdesk</li><li>2. Pemanfaatan Ticketing System</li><li>3. Evaluasi &amp; Perbaikan Kinerja Tim Helpdesk</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen Layanan.
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Layanan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

### 1.2.4. Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM TIK

**Tabel 1.2.4.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen SDM

Deskripsi	:	Manajemen SDM TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK</li><li>2. Peta Jabatan</li><li>3. Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK</li><li>4. Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	Penerapan Manajemen SDM TIK
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO dan BKPSDM
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen SDM TIK mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## 1.2.5. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

**Tabel 1.2.5.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Aset TIK

Deskripsi	:	Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur)</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK</li> <li>3. Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK</li> <li>4. Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Manajemen Aset TIK</li> <li>2. Evaluasi Penerapan Manajemen Aset TIK</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Pada penyusunan manajemen Aset TIK SPBE mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## 1.2.6. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

**Tabel 1.2.6.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Pengetahuan

Deskripsi	:	Manajemen Pengetahuan yaitu pengelolaan informasi dan pengetahuan dalam sebuah sistem pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan.</li> <li>2. Penyusunan dokumen perencanaan manajemen pengetahuan SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya.</li> <li>3. Pelaksanaan manajemen pengetahuan yang melibatkan seluruh unit kerja.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Manajemen Pengetahuan</li> <li>2. Aplikasi Knowledge Management System (SIMPAN-SPBE) digunakan secara optimal.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO & BKPSDM
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Pengetahuan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen

SPBE yang berlaku.

## 1.2.7. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

**Tabel 1.2.71.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Perubahan

Deskripsi	:	Manajemen Perubahan yaitu pendekatan siklus, dan sistematis pada transisi organisasi, program, dan kegiatan dari keadaan saat ini ke keadaan masa depan dengan target manfaat perubahan yang diharapkan.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Manajemen Perubahan SPBE Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi.</li><li>2. Penyusunan SOP manajemen perubahan SPBE.</li><li>3. Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan Manajemen Perubahan.</li><li>2. Evaluasi Penerapan Manajemen Perubahan.</li></ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO dan Bag. Organisasi
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	Dalam penyusunan manajemen Perubahan mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## 1.2.8. Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

**Tabel 1.2.8.1.** Program kerja Penyusunan dan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	:	Manajemen Keamanan Informasi penetapan ruang lingkup meliputi: Data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE di setiap OPD.
Spesifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi.</li><li>2. Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya.</li><li>3. Pelaksanaan program kerja SPBE: menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun.</li><li>4. Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE.</li><li>5. Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE.</li></ol>
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penilaian Audit Keamanan SPBE</li><li>2. SOP Keamanan Informasi</li></ol>
Unit Kerja	:	DISKOMINFO

Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: Pada penyusunan manajemen Keamanan Informasi mengikuti arahan kebijakan terkait manajemen SPBE yang berlaku.

## 1.3. Layanan SPBE

### 1.3.1. Survey Pengguna SPBE

**Tabel 1.3.1.1.** Program Kerja Survey Penggunaan SPBE

Deskripsi	: Melakukan survey kepada ASN dan Bisnis dan Masyarakat yang menggunakan layanan SPBE.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal</li> <li>2. Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik</li> </ol>
Detail	: Melakukan survey dengan metode pengukuran efektivitas layanan SPBE
Indikator Pencapaian	: Telah dilakukannya pengukuran layanan SPBE dan melakukan perbaikan atas masukan yang ada.
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO dan Bag. Organisasi
Pelaksanaan	: 2023 - 2027
Keterangan	: Survey Kepuasan Pengguna SPBE juga perlu disandingkan dengan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat di masing-masing jika diperlukan.

### 1.3.2. Pengembangan Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

**Tabel 1.3.2.1.** Program Kerja Pengembangan Portal Pelayanan Publik Terintegrasi

Deskripsi	: Aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik dalam satu platform.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan</li> <li>2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik</li> </ol>
Detail	<p>Platform : Web Mobile</p> <p>Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On</p>

Fitur	<p>:</p> <p>(Informasi Publik)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Pengumuman</td> <td style="text-align: center;">Berita</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CCTV</td> <td style="text-align: center;">Streaming</td> </tr> </table> <p>(Layanan Publik)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ketenagakerjaan</td> <td style="text-align: center;">Penanaman Modal</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Pendidikan</td> <td style="text-align: center;">Pajak &amp; Retribusi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kesehatan</td> <td style="text-align: center;">Marketplace</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Hukum</td> <td style="text-align: center;">Event</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aduan Masyarakat</td> <td style="text-align: center;">Open Data</td> </tr> </table>	Pengumuman	Berita	CCTV	Streaming	Ketenagakerjaan	Penanaman Modal	Pendidikan	Pajak & Retribusi	Kesehatan	Marketplace	Hukum	Event	Aduan Masyarakat	Open Data
Pengumuman	Berita														
CCTV	Streaming														
Ketenagakerjaan	Penanaman Modal														
Pendidikan	Pajak & Retribusi														
Kesehatan	Marketplace														
Hukum	Event														
Aduan Masyarakat	Open Data														
Indikator Pencapaian	<p>:</p> <p>Terimplementasikannya portal layanan publik yang terintegrasi dengan aplikasi layanan publik internal Pemerintah Daerah</p>														
Unit Kerja Pelaksana	<p>:</p> <p>DISKOMINFO</p>														
Pelaksanaan	<p>:</p> <p>2023 - 2027</p>														
Keterangan	<p>:</p> <p>Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi layanan publik internal Pemerintah Daerah dan menjadikan API Kependudukan sebagai primary key di seluruh aplikasi layanan publik yang ada.</p>														

### 1.3.3. Pengembangan Portal Layanan Internal

**Tabel 1.3.3.1.** Program Kerja Pengembangan Portal Layanan Internal

Deskripsi	<p>:</p> <p>Aplikasi Portal Administrasi Pemerintahan Internal yang memudahkan ASN dalam mengakses layanan Administrasi Pemerintahan Internal dalam satu platform.</p>
Spesifikasi	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan</li> <li>2. Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal</li> </ol>
Detail	<p>:</p> <p>Platform : Web Mobile Technology : LDAP, Keycloak untuk Single Sign On</p>

Fitur	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Pengumuman</td> <td style="text-align: center;">Profil Pegawai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Presensi</td> <td style="text-align: center;">SKP</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Izin Cuti, Sakit, dsb</td> <td style="text-align: center;">Agenda Perangkat Daerah</td> </tr> </table>	Pengumuman	Profil Pegawai	Presensi	SKP	Izin Cuti, Sakit, dsb	Agenda Perangkat Daerah
Pengumuman	Profil Pegawai						
Presensi	SKP						
Izin Cuti, Sakit, dsb	Agenda Perangkat Daerah						
Indikator Pencapaian	: Terimplementasikannya portal Administrasi Pemerintahan Internal yang terintegrasi dengan aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal						
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO						
Pelaksanaan	: 2023 - 2027						
Keterangan	: Perlu membuat dokumentasi API untuk seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan Internal terkait dan menjadikan API Kepegawaian sebagai <i>primary key</i> di seluruh aplikasi Administrasi Pemerintahan internal yang ada.						

## 1.4. Aplikasi SPBE

### 1.4.1. Pengembangan Aplikasi

**Tabel 1.4.1.1.** Program Kerja Pengembangan Aplikasi Kedepan

Deskripsi	: Pengembangan aplikasi yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi prioritas utama (yang paling mudah untuk diimplementasikan dan memberikan <i>impact</i> yang signifikan). Aplikasi yang bersifat pelayanan publik juga menjadi prioritas utama pengembangan.
Spesifikasi	: Daftar aplikasi usulan perangkat daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: Tahap 1: <ol style="list-style-type: none"><li>1. e-Kontrak</li><li>2. Pengembangan e-Kinerja (TRK)</li><li>3. SIPENCAKAR</li><li>4. SIKERIS</li><li>5. e-Perda</li><li>6. e-IKAN</li><li>7. e-Peternakan</li><li>8. e-Retribusi</li><li>9. e-Pengawasan Perizinan</li><li>10. SimPAK</li><li>11. Pengembangan LIKE DISDIK</li><li>12. e-Prasarana Sekolah</li><li>13. e-Data Pendidikan</li><li>14. Smart PJU</li></ol> Tahap 2: <ol style="list-style-type: none"><li>15. Pengembangan SIMPEG modul IKET dan Integrasi data</li><li>16. Pengembangan SISMIOP berbasis Web</li><li>17. e-Audit</li></ol> Tahap 3: <ol style="list-style-type: none"><li>18. Si Asmat</li><li>19. WIRADADAHA</li><li>20. SMART</li><li>21. e-Potong Hewan</li><li>22. Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan</li><li>23. PEPELING</li><li>24. e-Investasi</li><li>25. Pengembangan File Station Synology</li><li>26. SIM PSU</li><li>27. e-PPKS</li><li>28. e-Kesejahteraan</li></ol>
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya aplikasi-aplikasi yang direncanakan

Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO dan OPD terkait
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	<p>Estimasi Anggaran Kebutuhan Pengembangan Aplikasi dijelaskan pada Lampiran 1. Pengembangan dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga (vendor). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan.</p> <p>Dalam pengembangan aplikasi seyogyanya berkoordinasi dengan DISKOMINFO dan mengikuti standar pengembangan teknologi milik Kota Tasikmalaya untuk menghindari lock-in vendor.</p>

## 1.4.2. Integrasi Aplikasi

**Tabel 1.4.2.1.** Program Kerja Integrasi Antar Aplikasi

Deskripsi	: Proses implementasi integrasi antar aplikasi, sesuai dengan Dokumen Panduan Integrasi dan dibangun di atas <i>platform</i> Integrasi. Pada proses ini akan dilaksanakan aktivitas pengembangan <i>services</i> pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan. Melakukan integrasi antar aplikasi dengan tujuan untuk membuat layanan SPBE mencapai indeks kematangan 4.
Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses integrasi aplikasi mengacu pada Arsitektur SPBE Kota Tasikmalaya</li> <li>2. Teknologi Integrasi berbasis API /Teknologi Pentaho.</li> <li>3. Menyediakan Dokumentasi API untuk seluruh sistem yang akan diintegrasikan.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: Terimplementasinya integrasi antar aplikasi sesuai Arsitektur SPBE Kota Tasikmalaya
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO dan OPD terkait
Pelaksanaan	: 2023 - 2027
Keterangan	: Integrasi antar aplikasi dapat dilakukan secara <i>in-house</i> dengan bantuan DISKOMINFO, maupun pengadaan aplikasi melalui pihak ketiga ( <i>vendor</i> ). Prioritas pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada tahun-tahun berjalan.

## 1.4.3. Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)

**Tabel 1.4.3.1.** Pengembangan Portal Data dan Dashboard Analytics

Deskripsi	: Guna mendukung pemanfaatan data sektoral sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan maka perlu <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard Analytics</i> .
Spesifikasi	: Aplikasi <i>dashboard</i> dan <i>data warehouse</i> setidaknya akan memiliki fitur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Report builder</i>, memiliki kemampuan menyusun laporan secara <i>custom</i> sesuai kebutuhan pimpinan.</li> <li>2. <i>Data mining</i> dan <i>warehousing</i>, memiliki kemampuan kustomisasi sumber data, dan memiliki <i>local temporary data</i>.</li> <li>3. Integrasi <i>back office application</i>, yang secara default pengambilan data terintegrasi dengan aplikasi <i>back office</i> yang berjalan.</li> <li>4. Aplikasi dashboard harus memiliki kualitas yang baik/<i>user friendly</i> saat diakses dari perangkat <i>mobile</i> maupun PC.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: Implementasi aplikasi <i>Data Warehouse</i> dan <i>Dashboard</i>
Unit Kerja	: DISKOMINFO dan OPD terkait

Pelaksana	
Pelaksanaan	: 2023
Keterangan	: Pengembangan dilakukan secara bertahap setiap tahun sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pengembangan aplikasi.

#### 1.4.4. Pemeliharaan Aplikasi

**Tabel 1.4.4.1.** Program Kerja Pemeliharaan Aplikasi

Deskripsi	: Pemeliharaan dan <i>upgrade</i> untuk seluruh sistem yang telah dimiliki perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan kontinuitas penggunaannya.
Spesifikasi	: <p>Aktivitas pemeliharaan/<i>upgrade</i> terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan kesehatan dan kinerja dari server aplikasi (<i>web server, database server, application server</i>) menggunakan aplikasi pemantauan seperti MRTG, LibreNMS, dan lain - lain.</li> <li>2. Melakukan perbaikan pada saat ditemukan <i>error/bug</i></li> <li>3. Mempertahankan agar sistem tetap berjalan dengan optimal</li> <li>4. Melakukan <i>upgrade patch</i> keamanan, maupun <i>patch</i> performa sistem</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: Aplikasi berjalan lancar secara <i>realtime</i>
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: -

## 1.5. Infrastruktur SPBE

### 1.5.1. Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Pusat Data

**Tabel 1.5.1.1.** Peningkatan Kapasitas Ruangan dan Perangkat Pendukung Pusat Data

Deskripsi	: Pusat Data merupakan lokasi penempatan perangkat <i>server</i> , <i>storage</i> , jaringan, dan keamanan jaringan. Server-server aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO Kota Tasikmalaya berada di Pusat Data.  Pusat Data DISKOMINFO perlu dipelihara untuk menjaga ketersediaan ( <i>availability</i> ), dan kinerja ( <i>performance</i> ) dari layanan infrastruktur server, dan jaringan. Pemeliharaan Pusat Data meliputi perangkat utama seperti server, storage, jaringan, dan keamanan jaringan. Selain itu perangkat pendukung juga perlu pemeliharaan secara rutin seperti catu daya listrik cadangan (Genset, dan UPS), sistem pendingin udara dan kelembaban (AC Presisi), sistem penanganan kebakaran ( <i>fire suppression system</i> ), kelistrikan, dan lain-lain.
Spesifikasi	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Letak Pusat Data berada gedung Diskominfo Kota Tasikmalaya;;</li><li>2. Pembagian ruangan area ruang server, staging, kelistrikan, UPS dan Battery, AC Presisi dan Fire Suppression System;</li><li>3. Sistem Kelistrikan;</li><li>4. Sistem Pendingin;</li><li>5. Sistem Jaringan Data;</li><li>6. Sistem Penanganan Kebakaran;</li><li>7. Sistem Pemantau Kondisi Lingkungan;</li><li>8. Sistem Keamanan Fisik;</li><li>9. Pemeliharaan perangkat utama seperti <i>server</i>, <i>storage</i>, perangkat jaringan, dan keamanan meliputi Sistem Operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i>, dan suku cadang.</li></ol>
Indikator Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data DISKOMINFO dipelihara secara mandiri atau menggunakan jasa pihak ketiga.</li><li>2. Konsolidasi server-server yang ada di OPD/UPT ke Pusat Data DISKOMINFO.</li><li>3. Sistem Operasi, <i>firmware</i>, <i>patch</i> perangkat server, storage, jaringan, dan keamanan jaringan adalah versi yang stabil atau direkomendasikan oleh pabrikan dan tidak ada celah keamanan.</li><li>4. Laporan pemeliharaan perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data DISKOMINFO secara periodik.</li></ol>
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023 - 2027
Keterangan	: -

## 1.5.2. Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Pusat Data

**Tabel 1.5.2.1.** Program Kerja Capacity Plan Pusat Data

Deskripsi	: Penyusunan rencana kapasitas ( <i>Capacity Plan</i> ) Pusat Data dilakukan untuk menjaga agar perangkat utama dan perangkat pendukung pusat data dapat tetap beroperasi dengan normal. Kegiatan ini untuk menjaga ketersediaan dan keandalan dari layanan sistem informasi yang dikelola oleh DISKOMINFO. Rencana kapasitas meliputi kebutuhan spesifikasi teknis server, storage, infrastruktur jaringan, perangkat keamanan jaringan, dan perangkat pendukung (sistem kelistrikan, luar ruangan, sistem pendingin).
Spesifikasi	: Kegiatan penyusunan rencana kapasitas terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data DISKOMINFO meliputi: <ol style="list-style-type: none"><li>1. perangkat utama<ul style="list-style-type: none"><li>- server</li><li>- storage</li><li>- perangkat jaringan</li><li>- perangkat keamanan jaringan</li></ul></li><li>2. perangkat pendukung<ul style="list-style-type: none"><li>- sistem kelistrikan (UPS, Genset)</li><li>- sistem pendingin ruangan (AC)</li><li>- sistem pemadam kebakaran (Fire Suppression, APAR)</li><li>- pengendali keamanan (access door, CCTV)</li></ul></li></ol>
Indikator Pencapaian	: Dokumen hasil rencana kapasitas terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung Pusat Data DISKOMINFO meliputi kondisi utilisasi perangkat minimal tiga bulan terakhir berdasarkan alat pemantau ( <i>monitoring tools</i> ), rencana pengembangan aplikasi/sistem, dan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas.
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023
Keterangan	: -

## 1.5.3. Pengadaan Pusat Pemulihan Bencana

**Tabel 1.5.3.1.** Pengadaan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana

Deskripsi	: Untuk menjaga tingkat ketersediaan dan kinerja layanan sistem informasi maka diperlukan lokasi cadangan penempatan server dan lainnya di Pusat Pemulihan Bencana. Sehingga jika terjadi kegagalan pada sistem informasi di Pusat Data maka operasionalisasi sistem aplikasi dipindah ke Pusat Pemulihan Bencana. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, jaringan, dan keamanan di Pusat Pemulihan Bencana harus sama dengan yang ada di Pusat Data.
-----------	--

Spesifikasi	: 1. Jarak fisik Lokasi Pusat Pemulihan Bencana minimal 40 km dari Pusat Data Diskominfo saat ini; 2. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan replikasi/backup ke Pusat Pemulihan Bencana; dan 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis.
Indikator Pencapaian	: 1. Lokasi Pusat Pemulihan Bencana berada pada jarak minimal 40 Km dari lokasi Pusat Data saat ini; 2. Diskominfo telah memiliki daftar aplikasi/sistem yang tergolong kritis; 3. Spesifikasi dan jumlah perangkat utama seperti server, storage, infrastruktur jaringan dan keamanan jaringan di Pusat Pemulihan Bencana sama seperti yang ada di Pusat Data khususnya untuk server aplikasi yang tergolong kritis; dan 4. Aplikasi/sistem yang tergolong kritis sudah dilakukan backup/replikasi ke Pusat Pemulihan Bencana.
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023
Keterangan	: -

#### 1.5.4. Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik

**Tabel 1.5.4.1.** Program Kerja Ujicoba Pemulihan Bencana Secara Periodik

Deskripsi	: Untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan Sistem Informasi di Pusat Pemulihan Bencana maka perlu dilakukan uji coba Pemulihan Bencana ( <i>Recovery Plan</i> ) secara periodik minimal satu tahun sekali. Kegiatan ini untuk memastikan <i>backup</i> dan replikasi yang sudah dilakukan dapat digunakan dan sesuai dengan harapan.
Spesifikasi	: 1. Tersedianya Pusat Pemulihan Bencana (DRC). 2. Spesifikasi dan jumlah server terutama yang tergolong kritis sama dengan yang ada di Pusat Data. 3. Aplikasi/Sistem Informasi terutama yang tergolong kritis sudah dilakukan <i>backup</i> dan replikasi <i>real time</i> ke Pusat Pemulihan Bencana.
Indikator Pencapaian	: 1. Status backup dan replikasi real time dari Pusat Data ke Pusat Pemulihan Bencana berjalan normal. 2. File backup dan replikasi dapat digunakan dan sesuai dengan kondisi terakhir. 3. Infrastruktur dan layanan Sistem informasi di Pusat Pemulihan Bencana dapat digunakan untuk menggantikan yang ada di Pusat Data selama rentang waktu tertentu. 4. Dokumentasi dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana dari Pusat Data ke Pusat

		Pemulihan Bencana.
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2024-2027
Keterangan	:	-

### 1.5.5. Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti

**Tabel 1.5.5.1.** Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti

Deskripsi	:	Infrastruktur Jaringan Data yang dikelola oleh DISKOMINFO Kota Tasikmalaya meliputi jaringan internet, jaringan antar Server, jaringan di OPD/UPT, dan interkoneksi dengan lembaga lain. Infrastruktur jaringan data perlu dipelihara untuk menjamin ketersediaan dan keandalan dari layanan jaringan data kepada pengguna internal maupun eksternal (masyarakat).
Spesifikasi	:	Infrastruktur jaringan terdiri dari perangkat jaringan (router, switch, Access Point), perangkat keamanan jaringan (Next-Generation Firewall), koneksi dari provider internet, kabel fiber optic, kabel UTP, dan lainnya.  Perangkat - perangkat yang tergolong kritis seperti Router Internet, Switch Core terdiri dari unit (redundant), dengan konfigurasi High Availability (HA). Perangkat lainnya seperti switch access menggunakan manageable switch sehingga dapat dipantau, dan dikonfigurasi.
Indikator Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perangkat jaringan dari router, switch inti, switch distribusi, switch akses, <i>next generation firewall</i> yang redundan.</li> <li>2. Perangkat jaringan menggunakan yang manageable sehingga dapat dipantau melalui alat pemantau, dan dikonfigurasi secara jarak jauh (Remote).</li> <li>3. Berfungsinya perangkat jaringan untuk melayani interkoneksi jaringan intra pemda dan jaringan internet.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2023-2027
Keterangan	:	-

## 1.5.6. Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT

**Tabel 1.5.6.1.** Pemeliharaan Jaringan Dalam Kota Interkoneksi OPD/UPT

Deskripsi	Koneksi jaringan dalam kota (Metropolitan Area Network) yang menghubungkan Network Operation Center Diskominfo dengan kantor OPD/UPT di beberapa lokasi perlu terus dipelihara untuk menjaga ketersediaan, keandalan, dan keamanannya.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. OPD/UPT sudah terkoneksi dengan NOC Diskominfo;</li><li>2. Akses aplikasi intranet berjalan dengan lancar; dan</li><li>3. Akses internet kantor OPD/UPT melalui NOC Diskominfo.</li></ol>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Semua OPD/UPT sudah terkoneksi dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo;</li><li>2. Infrastruktur jaringan koneksi antar OPD/UPT dalam masa pemeliharaan baik oleh pihak Diskominfo atau menggunakan pihak ketiga;</li><li>3. Jika pemeliharaan diserahkan kepada pihak ketiga, Diskominfo dan pihak ketiga menetapkan garansi layanan (SLA) dan waktu tanggap.</li><li>4. SLA yang telah ditetapkan dapat dipenuhi.</li></ol>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023-2027
Keterangan	-

## 1.5.7. Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

**Tabel 1.5.7.1.** Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi

Deskripsi	<p>Layanan jaringan data nirkabel (WiFi) yang dikelola oleh DISKOMINFO tersedia di kantor OPD/UPT, dan area umum tertentu. Pengguna yang menggunakan jaringan data nirkabel tersebut dapat mengakses aplikasi intranet, internet, maupun keduanya.</p> <p>Untuk menjamin ketersediaan, dan kinerja dari layanan jaringan data nirkabel maka infrastruktur jaringan data nirkabel perlu dikembangkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan lalu lintas data, proses, dan pengguna yang semakin besar serta untuk melindungi keamanan lalu lintas data.</p>
-----------	--

Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keamanan wifi menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise (<i>Wireless Fidelity Protected Access 2-Enterprise</i>). Protokol ini menggunakan autentikasi 802.1X atau EAP (<i>Extensible Authentication Protocol</i>). EAP merupakan protokol layer 2 yang menggantikan PAP dan CHAP.</li> <li>Setting security WPA enterprise/corporate ini membutuhkan sebuah server khusus yang berfungsi sebagai pusat autentikasi seperti Server RADIUS (<i>Remote Authentication Dial-In Service</i>). Dengan adanya Radius server ini, otentikasi akan dilakukan per-<i>client</i> sehingga tidak perlu lagi memasukkan <i>passphrase</i> atau <i>network key</i> yang sama untuk setiap <i>client</i>.</li> <li>Server RADIUS dapat menggunakan Active Directory atau LDAP;</li> <li>Acces Point mendukung mode <i>roaming</i> yakni jika pengguna berpindah tempat maka koneksi ke <i>Access Point</i> akan menyesuaikan dengan yang terdekat tanpa perlu melakukan otentikasi lagi.</li> <li>Terdapat perangkat WiFi Controller untuk pengelolaan dan operasional (manajemen) Access Point dan lainnya.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat perangkat <i>Wireless LAN Controller (WLC)</i> melakukan setting dan konfigurasi beberapa perangkat <i>access point</i> pada satu perangkat <i>controller</i>.</li> <li>Otentikasi pengguna WiFi sudah menggunakan protokol keamanan WPA2-Enterprise berdasarkan username dan password yang tersimpan di Server LDAP atau Active Directory.</li> <li>Pengguna yang berpindah tempat tidak perlu lagi melakukan otentikasi ulang;</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023 - 2025
Keterangan	-

## 1.5.8. Pengembangan API Gateway

**Tabel 1.5.8.1.** Pengembangan API Gateway

<p>Deskripsi</p>	<p>Sistem penghubung layanan Kota Tasikmalaya adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di lingkungan Kota Tasikmalaya dan dengan pemerintah pusat. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.</p> <p>Sistem Penghubung Layanan Pemerintah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Integrasi Data Proses integrasi dilakukan langsung pada basis data atau struktur data dari aplikasi dengan mengabaikan presentasi atau business logic ketika membuat integrasi.</li> <li>b. Integrasi Presentasi Proses integrasi dengan membuat antarmuka pengguna (user interface) yang menyediakan akses pada beberapa aplikasi.</li> <li>c. Integrasi Fungsional Diskominfo telah memiliki salah satu Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yakni integrasi data dengan menggunakan teknologi API dan telah memiliki infrastruktur API Management.</li> </ol>
<p>Spesifikasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. API Gateway Intranet untuk layanan service aplikasi internal dengan koneksi intranet;</li> <li>2. API Gateway Ekstranet untuk layanan service aplikasi Kementerian/Lembaga dengan koneksi internet;</li> <li>3. Pengembangan portal dengan basis Single Sign On (SSO);</li> <li>4. Perangkat perlindungan keamanan API Gateway.</li> </ol>
<p>Indikator Pencapaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya perangkat pengaman API Gateway;</li> <li>2. Tersedianya server API Gateway intranet dan ekstranet;</li> <li>3. Tersedianya perangkat pengaman API Gateway;</li> <li>4. Tersedianya server API Gateway intranet dan ekstranet;</li> <li>5. Tersedia sistem SSO;</li> <li>6. Tersedia portal aplikasi Kota Tasikmalaya yang berisi daftar aplikasi-aplikasi operasional.</li> </ol>
<p>Unit Kerja Pelaksana</p>	<p>DISKOMINFO</p>
<p>Pelaksanaan</p>	<p>2023 - 2027</p>
<p>Keterangan</p>	<p>-</p>

## 1.6. Keamanan Informasi

### 1.6.1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

**Tabel 1.6.2.1.** Program Kerja Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

Deskripsi	<p>Manajemen Keamanan Informasi adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>penetapan ruang lingkup;</li><li>penetapan penanggung jawab;</li><li>perencanaan;</li><li>dukungan pengoperasian;</li><li>evaluasi kinerja; dan</li><li>perbaikan berkelanjutan</li></ol> <p>Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu menyusun Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi sesuai dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>
Spesifikasi	<p>Proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>penetapan ruang lingkup;</li><li>penetapan penanggung jawab;</li><li>perencanaan;</li><li>dukungan pengoperasian;</li><li>evaluasi kinerja; dan</li><li>perbaikan berkelanjutan.</li></ol>
Indikator Pencapaian	Tersedianya Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023
Keterangan	-

## 1.6.2. Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

**Tabel 1.6.2.1.** Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	Standar Teknis keamanan data dan informasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan;</li> <li>2. Keaslian;</li> <li>3. Keutuhan;</li> <li>4. Kenirsangkalan; dan</li> <li>5. Ketersediaan.</li> </ol>
Spesifikasi	Daftar SOP mengacu pada Standar Teknis pada Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SOP Klasifikasi Informasi; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Enkripsi (dengan sistem kriptografi);</li> <li>2. SOP Pembatasan Akses terhadap Data dan Informasi;</li> <li>3. SOP Verifikasi, dan Validasi Keaslian Data dan Informasi;</li> <li>4. SOP Implementasi <i>Hash Function</i>;</li> <li>5. SOP Pendeteksian Modifikasi;</li> <li>6. SOP Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi;</li> <li>7. SOP Sistem Pencadangan (<i>backup</i>); dan</li> <li>8. SOP Sistem Pemulihan (<i>recovery</i>).</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.</li> <li>2. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan data dan informasi sesuai dengan rincian di spesifikasi.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023
Keterangan	-

### 1.6.3. Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE

**Tabel 1.6.3.1.** Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi

Deskripsi	<p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis web meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Autentikasi.</li><li>2. Manajemen sesi.</li><li>3. Persyaratan kontrol akses.</li><li>4. Validasi input.</li><li>5. Kriptografi pada verifikasi statis.</li><li>6. Penanganan error dan pencatatan log.</li><li>7. Proteksi data.</li><li>8. Keamanan komunikasi.</li><li>9. Pengendalian kode berbahaya.</li><li>10. Logika bisnis.</li><li>11. File.</li><li>12. Keamanan API dan web service, dan</li><li>13. Keamanan konfigurasi.</li></ol> <p>Standar Teknis keamanan aplikasi SPBE berbasis <i>mobile</i> meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyimpanan data dan persyaratan privasi;</li><li>2. Kriptografi;</li><li>3. Autentikasi dan manajemen sesi;</li><li>4. Komunikasi jaringan;</li><li>5. Interaksi platform;</li><li>6. Kualitas kode dan pengaturan build; dan</li><li>7. Ketahanan.</li></ol>
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur keamanan Aplikasi berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar kata sandi (<i>password</i>) meliputi jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;</li><li>2. SOP Klasifikasi Data, untuk data tergolong rahasia seperti kata sandi maka penyimpanannya dengan mekanisme kriptografi;</li><li>3. SOP Jalur Komunikasi Aplikasi yang Aman;</li><li>4. SOP Kontrol Akses Aplikasi;</li><li>5. SOP Kriptografi;</li><li>6. SOP Rekam Jejak;</li><li>7. SOP Error Handling Aplikasi;</li><li>8. SOP Pertukaran, Penghapusan, dan Audit Informasi;</li><li>9. SOP Sertifikat Elektronik;</li><li>10. SOP Konfigurasi server;</li></ol>

<p>Indikator Pencapaian</p>	<p>a. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi web meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Autentikasi,</li> <li>○ Manajemen sesi;</li> <li>○ Persyaratan kontrol akses;</li> <li>○ Validasi input;</li> <li>○ Kriptografi pada verifikasi statis;</li> <li>○ Penanganan error dan pencatatan log;</li> <li>○ Proteksi data;</li> <li>○ Keamanan komunikasi;</li> <li>○ Pengendalian kode berbahaya;</li> <li>○ Logika bisnis;</li> <li>○ File;</li> <li>○ Keamanan API dan web service; dan</li> <li>○ Keamanan konfigurasi.</li> </ul> <p>b. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi web sesuai dengan rincian di spesifikasi;</p> <p>c. Tersedianya dokumen standar teknis keamanan aplikasi mobile meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ penyimpanan data dan persyaratan privasi;</li> <li>○ kriptografi;</li> <li>○ autentikasi dan manajemen sesi;</li> <li>○ komunikasi jaringan;</li> <li>○ interaksi platform;</li> <li>○ kualitas kode dan pengaturan build; dan</li> <li>○ ketahanan.</li> </ul> <p>d. Tersedianya dokumen SOP untuk keamanan aplikasi mobile sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
<p>Unit Kerja Pelaksana</p>	<p>DISKOMINFO</p>
<p>Pelaksanaan</p>	<p>2023</p>
<p>Keterangan</p>	<p>-</p>

## 1.6.4. Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

**Tabel 1.6.4.1.** Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keamanan interoperabilitas data dan informasi</li> <li>2. kontrol sistem integrasi</li> <li>3. kontrol perangkat integrator</li> <li>4. keamanan API dan web service</li> <li>5. keamanan migrasi data</li> </ol>
Spesifikasi	<p>Standar dan prosedur Keamanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Dokumen dan Surat Elektronik;</li> <li>2. SOP <i>Update</i> Sistem Operasi dan Perangkat Lunak;</li> <li>3. SOP Sistem Recovery dan Restore pada perangkat integrator;</li> <li>4. SOP Migrasi Data;</li> <li>5. SOP Implementasi Kriptografi pada proses Penyimpanan dan Pengambilan Data;</li> <li>6. SOP Validasi Data ketika Proses Migrasi Data Selesai.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. keamanan interoperabilitas data dan informasi</li> <li>2. kontrol sistem integrasi</li> <li>3. kontrol perangkat integrator</li> <li>4. keamanan API dan web service</li> <li>5. keamanan migrasi data</li> </ol> <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Sistem Penghubung Layanan sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023
Keterangan	-

## 1.6.5. Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

**Tabel 1.6.5.1.** Program Kerja Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah

Deskripsi	<p>Standar teknis keamanan Jaringan Intra Pemerintah berdasarkan Perban BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</li><li>2. Kontrol akses dan autentikasi;</li><li>3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</li><li>4. Kontrol keamanan gateway;</li><li>5. Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</li><li>6. Kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</li></ol>
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Arsitektur Jaringan Intra;</li><li>2. Dokumen Aset Infrastruktur Jaringan;</li><li>3. SOP Pemeliharaan Keamanan Jaringan Intra;</li><li>4. Laporan Pengawasan Keamanan Jaringan Secara Periodik;</li><li>5. SOP Akses Perangkat Jaringan;</li><li>6. SOP Konfigurasi Perangkat Jaringan;</li><li>7. SOP Layanan Virtual Private Network (VPN);</li><li>8. SOP Akses Server Database;</li><li>9. Aplikasi <i>security information and event management</i> untuk <i>network logging, monitoring, dan analytics</i>;</li><li>10. Perangkat Next Generation Firewall (termasuk IPS atau IDS);</li><li>11. SOP Pembaruan sistem operasi, firmware, dan patch perangkat jaringan;</li><li>12. Perangkat Load Balancer koneksi jaringan dan aplikasi web;</li><li>13. Perangkat Web Application Firewall (WAF);</li><li>14. Pemasangan Sertifikat Elektronik;</li><li>15. Penerapan <i>content filtering</i>;</li><li>16. SOP Akses Jarak Jauh;</li><li>17. SOP Layanan akses WiFi;</li><li>18. Implementasi SSID untuk jaringan nirkabel;</li></ol>

Indikator Pencapaian	<p>Tersedianya dokumen standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>2. Kontrol akses dan autentikasi;</li> <li>3. Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;</li> <li>4. Kontrol keamanan gateway;</li> <li>5. Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel; dan</li> <li>6. Kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.</li> </ol> <p>Tersedianya dokumen SOP keamanan Jaringan Intra Pemerintah sesuai dengan rincian di spesifikasi.</p> <p>Terdapat perangkat pendukung keamanan jaringan Intra meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Next Generation Firewall</i> termasuk didalamnya fitur IPS/IDS;</li> <li>2. <i>Web Application Firewall (WAF)</i>;</li> <li>3. <i>Load Balancer</i> untuk koneksi jaringan;</li> <li>4. <i>Load Balancer</i> untuk aplikasi web;</li> <li>5. Perangkat <i>Content Filtering</i>;</li> <li>6. Sertifikat SSL.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO
Pelaksanaan	2023
Keterangan	-

### 1.6.6. Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

**Tabel 1.6.6.1.** Program Kerja Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi

Deskripsi	Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi ( <i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i> ) terhadap jaringan, server, dan aplikasi yang dikelola oleh DISKOMINFO.
Spesifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Kerentanan (<i>Vulnerability Assessment</i>) jaringan, server, dan aplikasi web</li> <li>2. Penetration Testing terhadap jaringan, server, dan aplikasi web menggunakan metode black box</li> <li>3. Dokumen hasil asesmen dan penetration testing beserta rekomendasinya</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (<i>Vulnerability Assessment and Penetration Testing - (VAPT)</i>) dilakukan secara periodik minimal satu tahun sekali;</li> <li>2. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi beserta rekomendasinya;</li> <li>3. Pelaksanaan hasil rekomendasi;</li> <li>4. Tersedia dokumen hasil penilaian kerentanan ulang dan pengujian penetrasi ulang.</li> </ol>
Unit Kerja Pelaksana	DISKOMINFO

Pelaksanaan	2023 - 2027
Keterangan	-

## 1.7. Audit SPBE

### 1.7.1. Pelaksanaan Audit SPBE

**Tabel 1.7.1.1.** Program kerja Audit SPBE

Deskripsi	: Melakukan Audit SPBE secara berkala
Spesifikasi	: Audit SPBE dilakukan secara internal dan eksternal, Audit SPBE terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit Aplikasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BPPT.</li> <li>2. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan berkoordinasi dengan Kemkominfo.</li> <li>3. Audit Keamanan Informasi SPBE dilakukan berkoordinasi dengan BSSN.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	: Terlaksananya Audit SPBE
Unit Kerja Pelaksana	: DISKOMINFO
Pelaksanaan	: 2023-2027
Keterangan	: -

## 1.8. SDM SPBE

### 1.8.1. Penambahan SDM TIK

**Tabel 1.8.1.1.** Program Kerja Penambahan SDM TIK

Deskripsi	: Perekrutan SDM TIK dalam rangka untuk penambahan kualifikasi engineer Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
Detail	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Developer Internal</li> <li>2. Peningkatan Kompetensi Tim Developer Internal</li> </ol>
Spesifikasi	: Kebutuhan SDM TIK: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Project Manager</li> <li>2. System Analyst</li> <li>3. UI/UX Designer</li> <li>4. Front-End Developer</li> <li>5. Back-End Developer</li> </ol>

		6. Application Support 7. Data Scientist/Engineer
Indikator Pencapaian	:	1. Tim Developer Internal mampu mengembangkan aplikasi yang dibutuhkan seluruh OPD. 2. Pemeliharaan aplikasi dapat dilakukan lebih agile.
Unit Kerja Pelaksana	:	DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2023 - 2027
Keterangan	:	-

## 1.8.2. Penyelenggaraan Training SDM TIK

**Tabel 1.8.2.1.** Program Kerja Penyelenggaraan Training SDM TIK

Deskripsi	:	Penyelenggaraan Advanced IT Training dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi engineer. Peningkatan jumlah engineer yang memiliki pemahaman yang baik terhadap pengembangan (development) bidang TI akan berkontribusi kemudahan dalam proses implementasi TI dan mengurangi kendala.
Spesifikasi	:	Lihat pada Tabel 1.8.2.2
Indikator Pencapaian	:	1. Terselenggaranya pelatihan 2. Jumlah peserta pelatihan
Unit Kerja Pelaksana	:	BKPSDM dan DISKOMINFO
Pelaksanaan	:	2023 - 2027

**Tabel 1.8.2.2.** Program Kerja Pengembangan Kompetensi SDM TIK

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Waktu Pelaksanaan
1	Arsitektur SPBE	Peta Proses Bisnis dengan BPMN	System Analyst	Menyesuaikan
		Enterprise Architecture Fundamental	System Analyst	Menyesuaikan
		Framework TOGAF	System Analyst	Menyesuaikan
		Scrum Master	Project Manager	Menyesuaikan
2	Data	Data Management With DMBOK	Data Scientist	Menyesuaikan
		Teknik Visualisasi Data dengan Business Intelligence	Data Scientist	Menyesuaikan
		Pemrograman untuk Pengolahan Data dengan Python & R Programming	Data Scientist	Menyesuaikan
		Data Analytic With Machine Learning	Data Scientist	Menyesuaikan
		Big Data Analytic In Practice	Data Scientist	Menyesuaikan

#	Domain	Jenis Pelatihan	Peran	Waktu Pelaksanaan
3	Aplikasi	Backend Web API Programming	Programmer	Menyesuaikan
		Frontend Web Development	Programmer	Menyesuaikan
		Mobile Frontend With PWA	Programmer	Menyesuaikan
		Back-end Web Programming With Laravel	Programmer	Menyesuaikan
		Front-end Web Development With Vue JS	Programmer	Menyesuaikan
		Android Secure Programming	Programmer	Menyesuaikan
		Mobile Programming With Flutter	Programmer	Menyesuaikan
		IT Service Management	Application Support	Menyesuaikan
		IT Quality Assurance	Application Support	Menyesuaikan
		Software Testing Implementation	Application Support	Menyesuaikan
		Software Testing Plan	Application Support	Menyesuaikan
4	Infrastruktur	Network Security with Mikrotik	Network Engineer	Menyesuaikan
		Traffic Management with Mikrotik	Network Engineer	Menyesuaikan
		Linux Fundamental	Network Engineer	Menyesuaikan
		Linux Network Services	Network Engineer	Menyesuaikan
		DevOps Introduction & Docker	Network Engineer	Menyesuaikan
		Docker Administration With Kubernetes	Network Engineer	Menyesuaikan
		Microservices In Development	Network Engineer	Menyesuaikan
		Pengelolaan Layanan Operasional Pusat Data	Network Engineer	Menyesuaikan
		Penetration Testing Method	Application Support	Menyesuaikan
5	Keamanan Informasi	IT Auditor	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 31000 (IT Risk And Controls)	Auditor	Menyesuaikan
		ISO 27001 (Information Security Management)	Auditor	Menyesuaikan

# **Bab II**

# **Roadmap &**

# **Estimasi Anggaran**

## 2.1. Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE Kota Tasikmalaya 2023–2027

**Tabel 2.1.1.** Peta Rencana Penyelenggaraan SPBE

**Misi :** Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi

**Sasaran :** Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE: Layanan Internal dan Publik Kota Tasikmalaya yang Optimal dan Efisien</b>								
<b>1</b>	<b>Tata Kelola</b>							
	<b>A Kebijakan SPBE</b>							
	<b>1 Kebijakan Tim koordinasi SPBE</b>							
	- Penyusunan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan					
	- Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	DISKOMINFO, BKPSDM dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>2 Kebijakan Forum Satu Data</b>							
	- Penyusunan Kebijakan Forum Satu Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan					
	- Pelaksanaan Kebijakan Forum Satu Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Forum Satu Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>3 Kebijakan Arsitektur SPBE</b>							
	- Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan					
	- Pelaksanaan Kebijakan Arsitektur SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Arsitektur SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>4 Kebijakan Peta Rencana SPBE</b>							
	- Penyusunan Kebijakan Peta Rencana SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan					
	- Pelaksanaan Kebijakan Peta Rencana SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Peta Rencana SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>5 Kebijakan Manajemen Data</b>							
	- Penyusunan Kebijakan Manajemen Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan					
	- Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Manajemen Data	DISKOMINFO, BAPPEDALITBANG dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	<b>6 Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE</b>								
	- Penyusunan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√					
	- Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Pembangunan Aplikasi SPBE	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>7 Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>								
	- Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Purworejo	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Purworejo	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Purworejo	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>8 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat</b>								
	- Penyusunan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>9 Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi</b>								
	- Penyusunan Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√					
	- Pelaksanaan Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>10 Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>								
	- Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan						
	- Pelaksanaan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Reviu dan Tindak Lanjut Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	DISKOMINFO dan Bag. Hukum	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>B Pembentukan Komite/Forum</b>								
	1 Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah ada						
	2 Komite Forum Satu Data	DISKOMINFO	Sudah ada						
	3 Komite Manajemen Risiko	Tim Koordinasi SPBE	Belum ada	√					
	<b>C Evaluasi dan Revisi Tata Kelola SPBE</b>								
	1 Evaluasi Indeks SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	2 Evaluasi dan Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	3 Evaluasi dan Revisi Manajemen SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	4 Evaluasi dan Revisi Layanan SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
<b>2</b>	<b>Manajemen</b>								
	<b>A Penyusunan Pedoman Manajemen</b>								

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	<b>1 Pedoman Manajemen Risiko</b>								
	- Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE, budaya risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√					
	- Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Manajemen Risiko	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√				
	- Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidental, FGD	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penetapan konteks risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan analisis Risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan seta level risiko SPBE & Penyusunan evaluasi Risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan rencana penanganan Risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi, dan penanggung jawabnya	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik dan insidental	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√				
	- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi risiko SPBE oleh PDSI	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>2 Pedoman Manajemen Data</b>								
	- Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data Kemkominfo	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√					
	- Penyusunan Arsitektur Data	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√					
	- Pengumpulan data sektoral dimasing-masing unit kerja	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Pemeriksaan pemenuhan data sektoral	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyebarluasan data sektoral	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Pembaruan Data Sektoral secara berkala	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penyimpanan data pada Portal Open Data	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Penjaminan kualitas data meliputi daftar data, data prioritas, dan jadwal pemutakhiran data	DISKOMINFO	Sudah dilakukan	√	√	√	√	√	√
	<b>3 Pedoman Manajemen Layanan</b>								
	- Pembentukan SK Tim Helpdesk	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√					
	- Pemanfaatan Ticketing System	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√
	- Evaluasi & Perbaiki Kinerja Tim Helpdesk	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√	√

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>4 Pedoman Manajemen SDM TIK</b>							
	- Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terhadap jabatan TIK	BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Analisis Peta Jabatan	BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Rencana atau laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM TIK	DISKOMINFO, BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM TIK	DISKOMINFO, BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>5 Pedoman Manajemen Aset TIK</b>							
	- Menginventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur)	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√				√
	- Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>6 Pedoman Manajemen Pengetahuan</b>							
	- Penyusunan Pedoman Manajemen Pengetahuan (Kebijakan dan SOP)	DISKOMINFO & BKPSDM	Belum dilakukan	√				
	- Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan	DISKOMINFO & BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Evaluasi dan Perbaikan Manajemen Pengetahuan	DISKOMINFO & BKPSDM	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>7 Pedoman Manajemen Perubahan</b>							
	- Manajemen Perubahan SPBE Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat Data dan Informasi	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	√				
	- Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	√				
	- Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	<b>8 Pedoman Manajemen Keamanan Informasi</b>							
	- Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√				
	- Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori risiko SPBE dan target realisasinya	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√				
	- Menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi, dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan resiko SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
	- Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√				
	- Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan supervisi keamanan SPBE	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
<b>3</b>	<b>Layanan</b>							
	<b>A Survey Penggunaan SPBE</b>							
	1 Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Internal	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	√	√	√	√	√

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
	2 Survey Kepuasan Penggunaan Aplikasi Publik	DISKOMINFO, Bag Organisasi	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
<b>B</b>	<b>Pengembangan Portal Layanan Publik Terintegrasi</b>							
	1 Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	2 Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Publik	DISKOMINFO	Belum ada		√	√	√	√
<b>C</b>	<b>Pengembangan Portal Layanan Internal</b>							
	1 Penyusunan Konsep Desain Integrasi Layanan	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	2 Pengembangan Aplikasi Portal Layanan Internal	DISKOMINFO	Belum ada		√	√	√	√
<b>4 Aplikasi</b>								
<b>A</b>	<b>Pengembangan Aplikasi</b>							
	1 Pengembangan e-Kinerja (TRK)	DISKOMINFO	Sudah ada	√				
	2 Pengembangan LIKE DISDIK	DISKOMINFO	Sudah ada	√				
	3 Pengembangan File Station Synology	DISKOMINFO	Sudah ada			√		
	4 Pengembangan SIMPEG modul IKET dan Integrasi data	DISKOMINFO	Sudah ada		√			
	5 Pengembangan SISMIOP berbasis Web	DISKOMINFO	Sudah ada		√			
<b>B</b>	<b>Usulan Aplikasi Baru</b>							
	1 e-Kontrak	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	2 SIPENCAKAR	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	3 SIKERIS	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	4 e-Perda	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	5 e-IKAN	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	6 e-Peternakan	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	7 e-Retribusi	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	8 e-Pengawasan Perizinan	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	9 SimPAK	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	10 e-Prasarana Sekolah	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	11 e-Data Pendidikan	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	12 Smart PJU	DISKOMINFO	Belum ada	√				
	13 e-Audit	DISKOMINFO	Belum ada		√			
	14 Si Asmat	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	15 WIRADADAHA	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	16 SMART	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	17 e-Potong Hewan	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	18 Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	19 PEPELING	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	20 e-Investasi	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	21 SIM PSU	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	22 e-PPKS	DISKOMINFO	Belum ada			√		
	23 e-Kesejahteraan	DISKOMINFO	Belum ada			√		
<b>C</b>	<b>Integrasi Aplikasi</b>	DISKOMINFO	Sudah Dilakukan		√	√	√	√
<b>D</b>	<b>Pengembangan Portal Data dan Dashboard (Big Data)</b>	DISKOMINFO	Belum ada		√	√		

No	Project/Activities	UIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
E	Pemeliharaan Aplikasi	DISKOMINFO	Sudah Dilakukan		√	√	√	√
<b>5 Infrastruktur</b>								
A	Peningkatan Kapasitas Ruang dan Perangkat Pendukung Ruang Server	DISKOMINFO	Sudah ada tetapi terbatas	√				
B	Penyusunan Rencana Kapasitas (Capacity Plan) Infrastruktur Utama Ruang Server	DISKOMINFO	Belum ada		√			
C	Peningkatan Kapasitas Pusat Pemulihan Bencana	DISKOMINFO	Belum ada		√			
D	Uji Coba Pemulihan Bencana Secara Periodik	DISKOMINFO	Belum ada			√	√	√
E	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Infrastruktur Jaringan Inti	DISKOMINFO	Sudah Ada tetapi belum redukan	√				
F	Pengadaan Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) OPD/UPT	DISKOMINFO	Belum ada	√	√	√	√	√
G	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Nirkabel (WiFi) Terintegrasi	DISKOMINFO	Belum ada	√	√	√		
H	Pengembangan API Gateway	DISKOMINFO	Belum ada	√	√	√	√	√
<b>6 Keamanan</b>								
A	Penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE	DISKOMINFO	Belum ada	√				
B	Penyusunan SOP Keamanan Data dan Informasi	DISKOMINFO	Belum ada	√	√			
C	Penyusunan SOP Keamanan Aplikasi SPBE	DISKOMINFO	Belum ada	√	√			
D	Penyusunan SOP Keamanan Sistem Penghubung Layanan	DISKOMINFO	Belum ada	√	√			
E	Penyusunan SOP Keamanan Jaringan Intra Pemerintah	DISKOMINFO	Belum ada	√	√			
<b>7 Audit TIK</b>								
A	Pelaksanaan Audit TIK							
1	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√		√		√
2	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√		√		√
3	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Inspektorat, DISKOMINFO	Belum dilakukan	√		√		√
<b>8 SDM TIK</b>								
A	Pembentukan Tim Developer Internal							
2	Perekrutan Tim Developer	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
3	Peningkatan Kompetensi Tim Developer	DISKOMINFO	Belum dilakukan	√	√	√	√	√
B	Penyelenggaraan Training SDM TIK	DISKOMINFO	Sudah Dilakukan	√	√	√	√	√

# **Bab III**

# **Penutup**

Laporan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) ini disusun guna memberikan rencana yang perlu diimplementasikan di Kota Tasikmalaya. Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari proses tabulasi dan analisa kondisi target yang selanjutnya diterjemahkan dalam rencana program kerja terkait SPBE.

Laporan Peta Rencana SPBE ini akan dijadikan sebagai landasan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Kota Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun mendatang dan juga substansi yang terdapat dalam peta rencana ini perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun berikutnya.



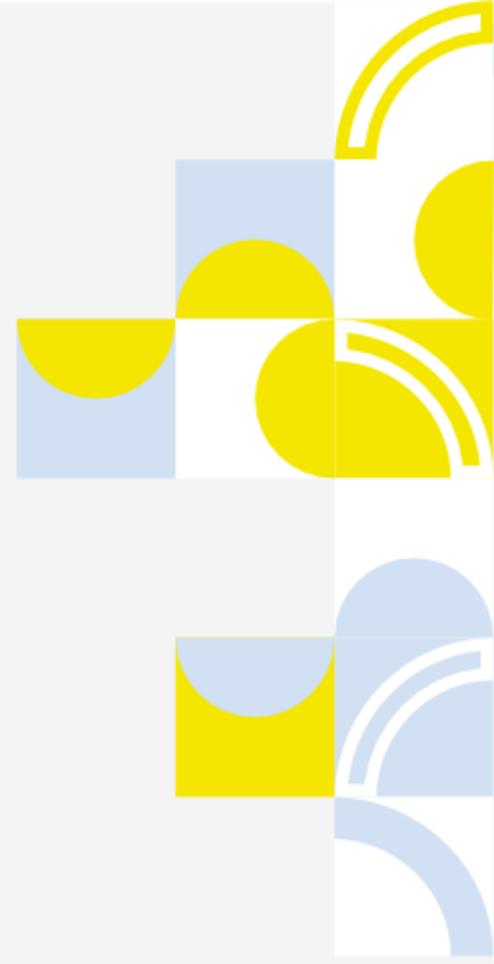
### **Pemerintah Kota Tasikmalaya, 2023**

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Estimasi Anggaran Kebutuhan Pengembangan Aplikasi

No	Aplikasi	SKEMA	Deskripsi	Effort	Platform	Durasi (bln)	Resource						Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Total	
							PM	SA	BackEnd	MobDev	WebDev / Desktop	QA	Total	PM	SA	Back End	Mobile Dev	WebDev		QA
APPU-001	e-Kontrak	Pengembangan	Sistem untuk memfasilitasi Perjanjian Kinerja keseluruhan pegawai ada dalam satu aplikasi	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-002	Pengembangan SIMPEG modul IKET dan Integrasi data	Pengembangan	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Sulit	Mobile	3	1	1	1	2	0	1	6	Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 16.000.000	Rp 0	Rp 8.800.000	Rp 137.400.000
APPU-003	Pengembangan e-Kinerja (TRK)	Pengembangan	Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Kinerja Pegawai	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-004	SIPENCAKAR	Pengembangan	Sistem Informasi Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-005	SIKERIS	Pengembangan	Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Kendaraan milik Pemda	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-006	Pengembangan SISMIOP berbasis Web	Pengembangan	Sistem Informasi untuk Pengelolaan Administrasi PBB-P2	Sulit	Web Based	3	1	1	1	0	2	1	6	Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 9.000.000	Rp 8.800.000	Rp 116.400.000
APPU-007	e-Perda	Pengembangan	Sistem Informasi Pengajuan dan Konsultasi Produk Hukum	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-008	Si Asmat	Pengembangan	Sistem Informasi dan Aspirasi Masyarakat Kota Tasikmalaya	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-009	WIRADADAHA	Pengembangan	World Internet Recommendation & Application of Dadaha	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 0	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 46.600.000
APPU-010	SMART	Pengembangan	Stakeholder Management Account of Creative Economy & Tourism	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-011	e-IKAN	Pengembangan	Sistem Informasi Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi secara Online	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-012	e-Peternakan	Pengembangan	Sistem Informasi Pelayanan Bidang Peternakan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-013	e-Potong Hewan	Pengembangan	Sistem Informasi pelayanan Rumah Potong Hewan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-014	Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	Pengembangan	Sistem Informasi Pertanian dan Perikanan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-015	e-Retribusi	Pengembangan	Sistem Informasi Retribusi Dinas Lingkungan	Mudah	Mobile	2	1	0	1	1	0	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 0	Rp 8.800.000	Rp 63.600.000
APPU-016	PEPELING	Pengembangan	Sistem Informasi Pelaporan Pengelolaan Lingkungan	Mudah	Mobile	2	1	0	1	1	0	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 0	Rp 8.800.000	Rp 63.600.000
APPU-017	e-Pengawasan Perizinan	Pengembangan	Sistem Informasi Pengawasan Perizinan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-018	e-Investasi	Pengembangan	Sistem Informasi Investasi daerah	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-019	SimPAK	Pengembangan	Sistem Informasi Jabatan Fungsional Guru	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-020	Pengembangan LIKE DISDIK	Pengembangan	Sistem Informasi Usulan Layanan Kepegawaian	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-021	e-Prasarana Sekolah	Pengembangan	Sistem Informasi Sarana Prasarana Sekolah	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-022	e-Data Pendidikan	Pengembangan	Sistem Informasi Data Pendidikan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-023	Smart PJU	Pengembangan	Sistem Informasi Smart PJU	Mudah	Mobile	2	1	0	1	1	0	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 8.000.000	Rp 0	Rp 8.800.000	Rp 63.600.000
APPU-024	Pengembangan File Station Synology	Pengembangan	Sistem Informasi Kearsipan	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-025	SIM PSU	Pengembangan	Sistem Informasi Management Prasarana Sarana Utilitas	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-026	e-PPKS	Pengembangan	Sistem Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-027	e-Kesejahteraan	Pengembangan	Sistem Pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Mudah	Web Based	2	1	0	1	0	1	1	4	Rp 10.000.000	Rp 0	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.500.000	Rp 8.800.000	Rp 56.600.000
APPU-028	e-Audit	Pengembangan	Sistem Informasi Audit (Data Mulai dari Perencanaan, Penganggaran S/D Pertanggungjawaban)	Sulit	Web Based	3	1	1	1	0	2	1	6	Rp 10.000.000	Rp 6.000.000	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 9.000.000	Rp 8.800.000	Rp 116.400.000



Pemerintah Kota Tasikmalaya